

HARIAN
UNTUK UMUM

TERBIT SEJAK
01 MARET 2011

PENDIRI:
Ardi, S.Si, Apt

Edisi Khusus

BUTON, BUTENG, BUSEL, BUTUR, WAKATOBI, MUNA, MUBAR, KOLAKA
BOMBANA, KENDARI, BAUBAU

Baubau Post

Baubaupost.com

Sabtu

23 November 2024

Eceran Rp 5000

Berlangganan Rp 100.000/ bulan

Info Langganan dan Iklan HP/WA: 082160543989

Dirut RSUD Baubau dr Sadly Salman Klarifikasi Tuntutan Mahasiswa Mengenai Kualitas Pelayanan di Poli Saraf



Dirut RSUD Baubau dr Sadly Salman dan dokter ahli Saraf dr LM Fatahilla menggelar konferensi pers

Laporan: Amat Jr, Baubau Post, Durasi Times

BAUBAU, BP-Berkaitan aksi mahasiswa beberapa waktu yang lalu mempertanyakan kualitas pelayanan di RSUD Kota Baubau terutama di Poli Saraf, Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kota Baubau melalui Kepala RSUD dr H Sadly Salman, SPOG dan dr. LM Fatahillah, M.Kes., Sp.N.FINA dokter spesialis NEURO memberikan klarifikasi pada rapat koordinasi penyelesaian pengaduan pasien di RSUD Baubau pada Rabu (20/11/2024).

Perluasan Desa Anti Korupsi, Pemprov Sultra Tingkatkan Pemahaman Pengelolaan Keuangan Pemerintahan Desa



Laporan: Mashuri

KENDARI, BP-Dalam rangka meminimalkan kasus tindak korupsi pada pemerintahan desa

di Bumi Anoa maka Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra) melalui Dinas PMDnya melakukan peningkatan

pemahaman dan kemampuan kepala desa, terkait pengelolaan keuangan di desa.

Lanjutkan ke Hal: 7

Pemkot Baubau Komitmen Atasi Masalah Gizi



Laporan: Ardi

BAUBAU, BP-Mengatasi masalah gizi sebagai langkah dasar untuk men-

ciptakan generasi penerus yang kuat dan berpotensi menjadi pilar kemajuan

Lanjutkan ke Hal: 7

Kapolri Perintahkan Tindak Tegas Polisi yang Beking Tambang Ilegal



Kapolri Jenderal
Listyo Sigit Prabowo

KAPOLRI Jenderal Listyo Sigit Prabowo memerintahkan anggota yang menjadi beking tambang ilegal untuk ditindak tegas.

“Yang membeking tindak tegas. Tinggal dilaporkan saja,” kata Sigit di Kemenko PMK, Jumat (22/11).

Kasus anggota diduga jadi beking tambang

Lanjutkan ke Hal: 7

Diseminasi Data Penanaman Modal dan Perizinan



Pewarta: Lisna

BAUBAU, BP-Perkembangan teknologi informasi menuntut organisasi perangkat dae-

rah (OPD) aktif menyajikan informasi, karena keterbukaan informasi sudah menjadi keharusan terkait program dan

kegiatan yang telah dilakukan.

Asisten II Setda Kota Baubau Dra Hj Asmahani,

Lanjutkan ke Hal: 7



Andina Latief, SKM
DIREKTUR

SEGENAP PIMPINAN, REDAKSI, & KARYAWAN PT FAREN GRAFIKA

PENERBIT SURAT KABAR HARIAN (SKH) BAUBAU POST (www.baubaupost.com)

Mengucapkan :

Terimakasih Kepada Dewan Pers Yang Telah Menetapkan SKH Baubau Post

(www.baubaupost.com) Sebagai Media Terverifikasi
per Tanggal 30 Desember 2022



Dirut RSUD Baubau dr Sadly Salman Klarifikasi Tuntutan Mahasiswa Mengenai Kualitas Pelayanan di Poli Saraf

datang terlambat di pelayanan poliklinik saraf RSUD Kota Baubau yang kebetulan ada keluarga pasien yang protes. Namun pihaknya sudah menjelaskan keterlambatannya dikarenakan ada keperluan yakni membeli tiket pesawat untuk berangkat mengikuti pertemuan ilmiah di Palembang.

Kemudian, kejadian kedua terkait dengan salah seorang pasien yang menderita penyakit sebenarnya TBC melitus dan saraf terjepit. Selama dua tahun ini komunikasi sangat baik secara kekeluargaan dan selalu memberikan layanan yang terbaik mulai pengobatan ringan sampai obat-obatan bisa. Hanya saja, belum sembuh juga mulai juga

fisioterapi belum ada perubahan mulai dengan teknik infasif dengan menyuntik saraf terkejutnya tetap tidak ada perubahan sampai yang paling atas dianjurkan tindakan prosedur.

“Sayangnya belum ada perubahan juga maka itu ada kata-kata saya yang sebenarnya itu kata-kata gaul yakni saat ini saya bendera putih dulu mengingat hubungan kekeluargaan sama pasien ini. Saya hentikan pengobatan dulu, kembalikan pasien ke spesialis penyakit dalam untuk menegobati TBC melitus karena itu bukan kewenangan dokter saraf. Cuma keluarga pasien yang tidak menerima entah dia salah dengar atau bagaimana tidak menerima bahasa saya

bendera putih, padahal yang saya maksudkan belum bisa mengambil tindakan dulu ke pasien ini sebab masih melihat rekam medisnya.”

Sementara itu, Direktur RSUD Kota Baubau dr H Sadly Salman, SPOG menjelaskan, jika membahas tentang penanganan medis tentu panjang. Jadi yang mungkin menjadi halangan adalah adanya miskomunikasi antara kata-kata yang diucapkan oleh dr.Fatahillah dengan apa yang diterima keluarga pasien. Padahal yang dimaksud dr.fatahillah bendera putih itu adalah belum bisa mengambil tindakan lebih lanjut terhadap pasien dan harus dirujuk ke penyakit dalam sebagai original pasiennya

padahal pasien ini dengan TBC melitus.

Terkait dengan sanksi yang diberikan kepada dr.fatahillah, RSUD Baubau dalam menjaga kualitas pelayanan sudah meminta kepada semua untuk melaksanakan pelayanan dengan tepat waktu dan itu sudah masuk dalam komitmen semua yang ada di RSUD. Jika jenis aturan itu dilanggar maka akan dijatuhkan sanksi administratif yang berkaitan dengan status kepegawaian yang ada di RSUD. Begitu juga dengan dr.fatahillah maka akan dikenakan sanksi administratif sesuai peraturan terhadap pegawai atau ASN yang ada di RSUD.*

Perluasan Desa Anti Korupsi, Pemprov Sultra Tingkatkan Pemahaman Pengelolaan Keuangan Pemerintahan Desa

Upaya tersebut salah satunya dikemas melalui lokakarya perluasan desa anti korupsi Provinsi Sultra Tahun 2024, Senin malam (18/11/2024) di Kendari, yang dibuka oleh Pj. Gubernur, Komjen Pol. (P) Dr (H.C) Andap Budhi Revianto.,S.I.K.,M.H yang diwakili Sekda Sultra, Drs. H Asrun Lio.,M. Hum.,Ph.D.

Dalam kegiatan tersebut, turut menghadirkan para pihak berkompeten termasuk diantaranya KPK RI melalui virtual.

Mengawali sambutannya, Sekda Sultra, Asrun Lio menjelaskan, desa merupakan unsur pemerintahan terdepan di Indonesia termasuk di Sultra, dimana desa memiliki wilayah dan masyarakat yang berhak mengatur sistem pemerintahannya, sesuai dengan ketentuan regulasi yang telah ditetapkan oleh pemerintah.

Sekda Sultra mengatakan, sejak lahirnya UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa pemerintah, negara telah memberikan perhatian yang sangat besar terhadap pemerintah desa, diantaranya pemberian kewenangan kepada desa yang diikuti dengan transfer dana desa yang ditujukan untuk pembangunan infrastruktur serta pembangunan masyarakat desa itu sendiri.

Dia melanjutkan, untuk Tahun 2024 saja sesuai dengan pasal 14 UU APBN tahun 2024, dana desa dialokasikan sebesar Rp. 71 triliun, dengan rincian Rp 69 triliun untuk APBDDES induk, sedangkan Rp 2 triliun akan ditambahkan bagi desa

dengan kategori kinerja terbaik.

“Hal ini menunjukkan keseriusan pemerintah untuk membangun desa sebagai fondasi awal pembangunan daerah bahkan nasional,” ujarnya.

Sekda Sultra mengatakan lagi, besarnya alokasi anggaran yang diterima oleh pemerintah desa setiap tahun, tentunya memberikan peluang bagi desa untuk berinovasi dalam meningkatkan dan mengembangkan segala potensi yang dimiliki.

Namun tentunya, masih Sekda Sultra, anggaran tersebut juga harus bisa digunakan dan dipertanggungjawabkan dengan sebaik mungkin, sesuai dengan regulasi yang berlaku.

“Tantangan yang dihadapi pemerintah desa saat ini yaitu, bagaimana menyusun perencanaan dan mengelola anggaran tersebut dengan efektif dan efisien. Faktanya saat ini bahwa sebagai besar desa di Indonesia belum memanfaatkan dana yang dikelola dengan baik dan berdasarkan kebutuhan masyarakat,” ucapnya.

Tantangan lain, masih Sekda Sultra ini, terkait pengelolaan keuangan desa adalah kurangnya kompetensi dan kesadaran pemerintah desa yang ada saat ini, seperti diketahui bersama bahwa di Sultra saat ini masih terdapat kurang lebih 40% kepala desa yang hanya berpendidikan setingkat SLTA, sehingga kemampuan dalam memahami mekanisme pengelolaan keuangan desa sangatlah rendah.

“Selain itu masih banyak pemerintah desa yang menganggap seolah-olah

dana desa itu adalah milik sendiri, sehingga bebas menggunakannya sesuai keinginannya. Tentu berbagai tantangan tersebut menjadi tugas dan tanggung jawab bersama pemerintah, pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten, untuk dapat meningkatkan pemahaman dan kesadaran bagi kepala desa dan aparaturnya agar tidak salah dalam mengelola keuangan desa,” tuturnya.

Sekda Sultra menuturkan jika korupsi merupakan tindakan yang dilakukan seseorang dalam jabatannya sebagai pejabat publik, untuk menambah harta kekayaannya sendiri atau kelompoknya, yang menyebabkan adanya kerugian negara.

“Korupsi jika dilakukan oleh seorang kepala desa ataupun perangkatnya akan sangat merugikan bagi pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa, sehingga dapat menghambat perkembangan suatu desa, sebagai perwakilan pemerintah pusat di daerah yang diamanahkan dalam undang-undang no 6 tahun 2014 tentang desa, pemerintah provinsi Sulawesi Tenggara berkewajiban untuk melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap jalannya pemerintahan desa,” ucapnya lagi.

Dia melanjutkan, termasuk melakukan upaya pencegahan korupsi di tingkat pemerintah desa. Lokakarya perluasan dan percontohan desa anti korupsi yang dilaksanakan saat ini, merupakan wujud nyata keseriusan pemerintah provinsi

dalam rangka mendukung langkah strategis komisi pemberantasan korupsi (kpk) republik indonesia, untuk menjaga agar pemerintah desa di Sulawesi Tenggara terhindar dari tindakan korupsi.

“Kami sangat mengharapkan pemahaman dan pengetahuan tentang pencegahan korupsi bagi pemerintah desa yang saudara dapatkan melalui lokakarya ini, agar dapat diteruskan ke pemerintah desa di wilayah saudara, sehingga kedepannya tidak ada lagi kepala desa yang terjerat kasus korupsi,” pesannya.

Dia juga mengajak semua pihak untuk terus bersama dalam mengawasi dan membina desa, agar bisa mewujudkan Sulawesi Tenggara yang maju melalui peningkatan kualitas kerja pemerintah desa yang bebas korupsi.

Turut hadir dalam kegiatan tersebut, diantaranya Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Sultra atau yang mewakili, Kepala BPKP Perwakilan Provinsi Sultra atau yang mewakili, Kepala Dinas PMD Sultra, Inspektur Daerah Provinsi Sultra atau yang mewakili, dan Kepala Dinas Kominformo Sultra atau yang mewakili.

Selanjutnya, Inspektur Daerah kabupaten se Sultra, Kepala Dinas PMD kabupaten se Sultra, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika kabupaten se Sultra, Kepala Bidang Pemdes se Sultra atau masing-masing yang mewakili, para kepala desa, dan berbagai pihak terkait lainnya.*

Diseminasi Data Penanaman Modal dan Perizinan

M.Si saat membacakan sambutan Pj Wali Kota Baubau pada kegiatan sosialisasi pengembangan sistem informasi penanaman modal tahun anggaran 2024 (diseminasi data penanaman modal dan perizinan) mengatakan, diseminasi data penanaman modal dan perizinan dapat menjadi sarana sharing pengelolaan data penanaman modal dan perizinan pelayanan terpadu satu pintu Kota Baubau sehingga dapat mendorong iklim investasi yang kondusif untuk pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.

Menurut Asmahani, sosialisasi pengembangan

sistem informasi penanaman modal ini dapat meningkatkan pengetahuan dan informasi terkait program dan kegiatan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu. Khususnya, kesadaraan modal dan perizinan agar selalu ingat kewajiban dan tanggung jawab untuk melaporkan LKPM nya.

Dikatakan, Dinas Pena-

naman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Baubau adalah organisasi perangkat daerah yang mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintah daerah di bidang penanaman modal berdasarkan peraturan pemerintah nomor 6 tahun 2021 tentang penyelenggaraan perizinan berusaha di daerah. Hadirnya peraturan pemerintah tersebut, merupakan dasar kepastian hukum agar penyelenggaraan perizinan berusaha di daerah dilaksanakan secara terintegrasi berbasis elektronik berdasarkan norma, standar, prosedur dan kriteria yang ditetapkan oleh pemerintah pusat. (*)

Kapolri Perintahkan Tindak Tegas Polisi yang Beking Tambang Ilegal

berkaitan dengan peristiwa polisi tembak polisi di Solok Selatan, Sumatera Barat.

Kasat Reskrim Polres Solok Selatan AKP Uli Riyanto Anshari ditembak oleh Kabang Ops AKP Dadang Iskandar.

Perbuatan AKP Dadang itu diduga karena ia tidak terima terhadap penegakan hukum yang dilakukan Uli terhadap tambang-tambang ilegal di Solok Selatan.

Sigit mengatakan Propam sudah diturunkan untuk mengusut peristiwa itu. Menurutnya, peristiwa penembakan itu bukan karena konflik internal.

“Saya kira bukan masalah konflik internal ya, proses sedang dialami, Propam kita turunkan,” kata Sigit.

Ia mengatakan peninda-

kan harus dilakukan dari sisi etik dan pidana. Apalagi, kata dia, jika didapati motif perbuatan itu karena pelaku berbuat hal-hal yang menciderai institusi.

“Saya minta siapapun, apapun pangkatnya, tindak tegas, enggak usah ragu-ragu,” ujarnya.

Ketua Komisi III Habiburrokhman telah meminta pengusutan tak berhenti sebatas pada kasus penembakan. Melainkan juga kasus yang menjadi penyebab pertikaian tersebut.

“Kami minta peristiwa ini diusut tuntas baik kasus penembakan hingga tewasnya maupun kasus yang melatarbelakangi pertikaian ini. Info yang kami dapat terkait dengan penindakan penambangan ilegal tipe galian

c,” kata Habib dalam konferensi pers, kompleks parlemen, Jakarta, Jumat (22/11).

Ia meminta pihak terkait untuk mengusut apakah betul pelaku benar menjadi beking tambang ilegal yang tengah dalam penindakan oleh korban beserta jajarannya.

Habib pun menyatakan ia akan memanggil jajaran terkait di Polri untuk mengusut kasus ini.

“kami akan memanggil Kapolres [Solok Selatan], Kapolda, dan Kadiv Propam Mabes Polri agar kasus-kasus seperti ini bisa benar-benar diusut secara tuntas dan juga jangan sampai terjadi lagi di kemudian hari,” ujarnya. (*)

Pemkot Baubau Komitmen Atasi Masalah Gizi

bangsa dengan mewujudkan cita-cita bangsa Indonesia menuju Indonesia Emas tahun 2045.

Demikian dikatakan Plh Sekda Kota Baubau Dra Hj Asmahani, M.Si saat mewakili Pj Wali Kota Baubau pada pelaksanaan uji coba makan bergizi gratis di SDN Wangkanapi Rabu (20/11/2024).

Menurut Asmahani, salah satu program dalam 100 hari kerja Presiden Prabowo Subianto adalah termasuk penurunan angka stunting menjadi salah satu fokus dalam upaya perbaikan gizi anak Indonesia terkhusus anak Indonesia Kota Baubau. Oleh sebab itu, pemberian makan bergizi pada anak sekolah dasar adalah salah satu cita-cita visi pemerintahan Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto.

Asmahani mengharapkan, mulai dari penyediaan akses pangan bergizi, peningkatan layanan kesehatan ibu dan anak sehingga program edukasi gizi kepada masyarakat khususnya masyarakat Indonesia. “Mari bersama-sama mendukung program perbaikan gizi bisa terlaksana dengan baik di Kota

Baubau sehingga harapan kita dapat terwujud menciptakan generasi bangsa sehat, kuat, berdaya saing dan berakhlak mulia,” harapnya.

Ditempat yang sama, Kadis Kesehatan dr Lukman, SPPD mengungkap, pelaksanaan uji coba makan bergizi gratis di SD Negeri Wangkanapi untuk anak kelas 1 dan jumlah paket yang diberikan ada 50. Dalam satu paket hari ini terdiri 200-300 Kkal dengan ada sumber protein, karbohidrat, lemak dan juga serat ditambah susu. Tetapi pihaknya melihat tekstur kontur makanan juga kualitas makanan karena ini diperuntukkan untuk anak-anak SD.

“Kemarin telah diinisiasi oleh bapak Wali Kota dan leading sektornya dari Dinas Pendidikan. Hari ini dari Dinas Kesehatan dan bukan tidak mungkin bapak Wali Kota menegajurkan jika ada stakeholder lain ingin mencoba bisa mengkoordinasikan ke Dinas Pendidikan atau Dinas Kesehatan. Boleh terbuka bagi siapa saja, makin banyak simulasi makin banyak informasi yang kita dapat yang bisa

kita analisa untuk perbaikan sistem ini. Jadi begitu masuk 2025 kita sudah tidak ada kendala dan sudah banyak informasi untuk diformulasikan untuk pemberian makan bergizi gratis ini,” ujarnya.

Sementara itu, Kadis Pendidikan dan Kebudayaan Kota Baubau Eko Prasetyo, ST, MM mengungkapkan, terkait soal pemenuhan standarisasi sarana dan prasarana di sekolah pihaknya telah berkoordinasi ke beberapa sekolah dan salah satunya di SD Negeri Wangkanapi untuk bagaimana standarisasi sarana dan prasarana mulai dari pemenuhan meja kursi yang mempunyai standar yang bagus.

“Alhamdulillah di penganggaran perubahan kita akan coba memenuhi itu artinya masalah kita cukup besar tetapi akan kita coba mengurai secara perlahan. Kita berharap di tahun 2027-2028 sarana prasarana kita sudah bisa terpenuhi dengan standarisasi yang bagus sehingga anak-anak lebih semangat lagi belajar, ibu bapak gurunya lebih semangat lagi mengajar di kelas,” tutupnya. (*)

Prabowo Kunjungi Abu Dhabi Sabtu, Pulang ke Indonesia Minggu



Presiden Prabowo akan menutup lawatan ke luar negeri dengan berkunjung ke Abu Dhabi, Uni Emirat Arab (UEA), Sabtu (23/11).

Laporan: Hadi

JAKARTA-Presiden Prabowo Subianto akan menutup lawatan ke luar negeri dengan berkunjung ke Abu Dhabi, Uni Emirat Arab (UEA), Sabtu (23/11).

"Saya rasa saya akan ke Emirat, Abu Dhabi, tanggal 23 [November]," kata Prabowo di London, Inggris di kanal

YouTube Sekretariat Presiden, Jumat (22/11).

Prabowo tak merinci akan membahas apa saja dengan pimpinan UEA nantinya. Namun, kata dia, Indonesia dan UEA merupakan sahabat dekat.

"Banyak yang dibahas, ya," tuturnya.

Usai lawatannya ke Abu Dhabi, Prabowo akan pulang ke Indonesia pada Minggu

(24/11). "Langsung pulang [tanggal] 24 saya sudah di Jakarta," lanjutnya.

Saat ini, Prabowo berada di Inggris untuk menggelar beberapa pertemuan dengan para pemimpin di negara tersebut. Prabowo mengaku masih memiliki beberapa pertemuan terbatas di London.

Ia sempat bertemu dengan Raja Charles III di Istana Buck-

ingham serta bertemu dengan Perdana Menteri (PM) Keir Starmer di Downing Street, London.

Prabowo memulai lawatannya luar negeri sejak 8 November 2024. Ia mengawali kunjungannya ke China untuk bertemu Presiden China Xi Jinping. Setelahnya, bertemu dengan Presiden Amerika Serikat Joe Biden di AS. (*)

Komisi X DPR: Penghapusan PPDB Zonasi Harus Dengar Beragam Aspirasi



ilustrasi. Komisi X DPR menegaskan warga dan stakeholder terkait harus dimintai pendapat soal penghapusan PPDB zonasi

JAKARTA-Komisi X DPR menilai penghapusan sistem zonasi sekolah dalam Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) harus mempertimbangkan aspirasi semua pihak. Ketua Komisi X DPR RI Hetifah Sjaifudien ingin kebijakan yang diputuskan benar-benar berdampak positif bagi pendidikan di Indonesia.

"Kami berpandangan sebaiknya kita mendengar pendapat

publik dan stakeholder, dengan mengundang para pemangku kepentingan, termasuk Mendikdasmen Abdul Mu'ti, dinas-dinas pendidikan, guru, orang tua siswa, dan pemerhati pendidikan, untuk membahas efektivitas zonasi serta keluhan masyarakat," kata Hetifah dikutip dari Antara, Jumat (22/11).

Hetifah menjelaskan sistem PPDB zonasi awalnya diterapkan

mengurangi ketimpangan kualitas sekolah dan mencegah diskriminasi dalam dunia pendidikan.

Namun, pelaksanaan sistem itu menghadapi tantangan, seperti ketidaksiapan fasilitas pendidikan di berbagai wilayah. Menurutnya, pemerintah dan pemangku kepentingan terkait perlu mengeksplorasi alternatif jika sistem zonasi benar-benar dihapus.

"Jika sistem zonasi

dianggap tidak efektif diperlukan alternatif yang lebih adil, seperti seleksi berbasis nilai (PPDB jalur prestasi diperkuat) atau dengan tambahan kuota afirmasi bagi siswa dari keluarga tidak mampu (PPDB jalur afirmasi)," ucapnya.

Komisi X DPR, kata Hetifah, mendorong pemerintah meningkatkan kualitas pendidikan dan pemerataan pendidikan. Ia berpendapat masalah utama yang memicu kritik terhadap zonasi adalah ketimpangan kualitas antar-sekolah. Sebelumnya, Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka mengaku telah meminta Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu'ti untuk menghilangkan sistem PPDB zonasi.

Dia menekankan pendidikan adalah kunci generasi emas dan Indonesia Emas 2045. Karena itu,

Wakil Menteri Pendidikan: Sistem PPDB Zonasi Akan Disempurnakan

JAKARTA-Wakil Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Atip Latipulhayat menyatakan sistem zonasi pada penerimaan peserta didik baru (PPDB) akan diperbaiki dan disempurnakan.

Hal ini ia sampaikan merespons permintaan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka yang mau menghapus sistem zonasi untuk penerimaan siswa baru.

"Perlu ada beberapa perbaikan dan penyempurnaan. Namun, kami belum sampai pada kesimpulan final," kata Atip kepada CNNIndonesia.com, Jumat (22/11).

Atip menuturkan belakangan ini, Kemendikdasmen telah melakukan kajian cukup komprehensif soal sistem zonasi dalam penerimaan siswa. Kemendikdasmen telah mengumpulkan berbagai

pihak untuk mendiskusikan kebijakan ini.

"Kami mengundang para kepala dinas, pakar, dan pihak-pihak terkait lainnya," ucapnya.

Gibran sebelumnya mengaku telah meminta Mendikdasmen Abdul Mu'ti untuk menghapus sistem PPDB. Ia menjelaskan dalam satu rapat koordinasi dengan para kepala dinas pendidikan, ia telah meminta mereka agar memprioritaskan persoalan pendidikan di Indonesia.

"Saya sampaikan secara tegas ke Pak Menteri Pendidikan 'Pak ini zonasi harus dihilangkan'," kata Gibran dalam pidatonya di Pembukaan Tanwir I PP Pemuda Muhammadiyah, Jakarta, Kamis (21/11).

Dikutip di laman resmi Kemendikbud,

sistem zonasi diatur di dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) Nomor 14 Tahun 2018 tentang PPDB.

Di dalam Pasal 16 aturan ini disebutkan bahwa sekolah yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah wajib menerima calon peserta didik yang berdomisili pada radius zona terdekat dari sekolah paling sedikit sebesar 90 persen dari total jumlah keseluruhan peserta didik yang diterima.

Adapun radius zona terdekat ditetapkan oleh pemerintah daerah sesuai dengan kondisi berdasarkan ketersediaan anak usia sekolah di daerah tersebut dan jumlah ketersediaan daya tampung dalam rombongan belajar pada masing-masing sekolah..(hadi)

PKB Minta Rencana Kenaikan PPN 12 Persen Ditunda

Laporan: Listar

JAKARTA-Ketua DPP PKB Dita Indah Sari meminta pemerintah menunda rencana kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) jadi 12 persen mulai 1 Januari 2025.

Ia menyoroti situasi ekonomi saat ini di mana daya beli masyarakat sedang menurun dan PHK yang mencapai hampir 65 ribu.

"PKB minta agar rencana PPN 12 persen per 1 Januari itu ditunda dulu, karena situasi daya beli masyarakat sedang menurun. PHK mencapai hampir 65 ribu," kata Dita saat dihubungi CNNIndonesia.com, Jumat (22/11).

Ia memahami kenaikan itu memang amanat dari UU HPP (Harmonisasi Peraturan Pajak) tahun

2021.

Namun, kata dia, ada klausul dalam UU itu yang memperbolehkan pemerintah dan DPR menyesuaikan tarif PPN itu, dalam bentuk Peraturan Pemerintah (PP).

"Boleh naik, boleh turun, dengan batas atas dan bawahnya (15 persen dan 5 persen). Ruang untuk meninjau kembali jelas ada. Jadi bukan harga mati harus naik," ujarnya.

Pemerintah akan menaikkan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dari 11 persen menjadi 12 persen mulai tahun depan. Pemerintah berda- lah menjalankan UU Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP).

Dalam beleid itu, pemerintah dan DPR memang menetapkan

kan PPN naik jadi 11 persen mulai 2022 dan menjadi 12 persen mulai 2025.

Meski mendapatkan tentangan di publik, Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan belum ada pembahasan kenaikan PPN akan ditunda.

Menurutnya, meski banyak perdebatan menaikkan pajak di tengah pelemahan daya beli, namun di satu sisi APBN sebagai shock absorber harus dijaga kesehatannya.

"Tapi APBN memang tetap harus dijaga kesehatannya. Karena APBN itu harus berfungsi dan mampu merespon dalam episode global crisis financial. Countercyclical tetap harus kita jaga," ujarnya dalam Rapat Kerja Komisi XI, Rabu (13/11).(*)

penting untuk memberikan kemudahan-kemudahan dalam mengakses pendidikan.

"Kemarin pada waktu rakor dengan para Kepala Dinas Pendidikan, saya sampaikan secara tegas ke Pak Menteri

Pendidikan, 'Pak ini zonasi harus dihilangkan'," ujar Gibran dalam acara Tanwir I PP Pemuda Muhammadiyah, di Jakarta Pusat, Kamis (21/11).

Putra sulung Presiden Joko Widodo (Jokowi) itu juga

menyampaikan pentingnya mengajarkan anak-anak muda pelajaran coding, programming, hingga digital marketing. "Karena sekarang kita tidak boleh ketinggalan dari negara-negara lain," katanya. (*)

Resmikan Mess Pemda Sultra di Makassar, Pj Gubernur ABR: Jaga Dengan Baik Aset Kita



Pewartu: Mashuri

SULSEL, BP-Penjabat (Pj) Gubernur Sulawesi Tenggara (Sultra), Andap Budhi Revianto, secara resmi meresmikan Mess Pemerintah Daerah (Pemda) Sultra yang berada di Kota Makassar, Rabu (20/11/24).

Acara diawali laporan yang disampaikan oleh Kepala Dinas Cipta Karya Provinsi Sultra, Martin Efen-di Patulak, yang menjelaskan bahwa Gedung mess ini dibangun semasa Gubernur Ali Mazi pada tahun 2019, telah melalui 6 tahapan pembangunan hingga akhirnya hari ini dapat diresmikan oleh Pj Gubernur, Andap, mess ini terdiri dari 6 lantai dengan total kamar sebanyak 32 kamar.

Pj Gubernur saat meresmikan Mess Pemda Sultra di Kota Makassar menyampaikan bahwa dalam prosesnya telah melalui review dari Inspektorat sehingga aset ini diresmikan.

Lebih lanjut, Pj Gubernur menegaskan bahwa pembangunan fasilitas ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas pelayanan, mendukung kinerja Aparatur Sipil Negara (ASN),

serta mendongkrak Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Dengan nilai investasi sebesar Rp36.467.396.000, Ia menekankan pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan fasilitas ini seraya mengingatkan agar Mess ini dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya, bebas dari praktik negatif seperti korupsi, perjudian, prostitusi, atau penyalahgunaan lainnya.

“Mess ini bukan tempat untuk hal-hal yang tidak bermoral. Pastikan fasilitas ini terawat baik, aman, dan bebas dari masalah hukum, 36 miliar adalah angka yang tidak sedikit dan itu adalah uang rakyat, jangan sampai ada penyimpangan,” tegasnya.

Selain itu, untuk pemanfaatan aset yang optimal, Pj Gubernur juga mengingatkan kepada stakeholder terkait untuk memedomani PP 27 tahun 2014 tentang siklus pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD) dalam mengelola aset-aset daerah, mulai dari tahap perencanaan kebutuhan anggaran, pemanfaatan hingga pembinaan, pengawasan, dan pengendalian.

Dengan pengelo-

laan yang transparan dan akuntabel, ke depannya diharapkan tidak ada lagi temuan berulang dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

Sebagai penutup, Pj Gubernur menekankan pentingnya kolaborasi antara Pemprov Sultra dan Pemkab/ Pemkot di Sulawesi Selatan (Sulsel) untuk memastikan mess ini dapat dimanfaatkan secara maksimal.

“Mess Pemda ini adalah wajah Sulawesi Tenggara di Sulawesi Selatan. Rawat dan manfaatkan mess ini dengan penuh rasa tanggung jawab. Jadikan ini sebagai tempat tinggal yang nyaman selama bertugas di Makassar, sekaligus menjadi pusat promosi daerah kita,” harapnya.

Setelah memberikan sambutan dan arahnya, Pj Gubernur secara resmi meresmikan Mess Pemda Sultra dengan ditandai penekanan hand sign pada layar dan pemotongan pita.

“Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, pada hari ini Rabu, 20 November 2024 Saya meresmikan Mess Pemda Sultra di Makassar,” un-

gaknya.

Selain itu Pj Gubernur dalam kesempatan juga meninjau secara langsung Gedung yang diresmikan dengan meninjau masing-masing kamar serta fasilitas yang dimiliki, antara lain ruang rapat dan ruang kerja atau working space.

Dalam tanggapannya kepada awak media, Pj Gubernur menyatakan bahwa Mess Pemda di Makassar merupakan langkah strategis untuk mendukung efektivitas tugas ASN yang bertugas di luar daerah, khususnya di Sulsel.

“Dengan adanya fasilitas ini, diharapkan ASN yang bertugas di Makassar dapat bekerja dengan lebih optimal dan efisien. Selain itu, fasilitas ini juga dapat menjadi sumber pendapatan daerah yang dapat menunjang pembangunan di Sulawesi Tenggara,” tuturnya.

Turut hadir dalam acara tersebut, Sekda Prov. Sultra, Plh. Asisten I Setda Prov. Sulsel, Pimti Pratama Tk. I Pemprov Sultra, serta Sekda Kota Makassar.*

Terapkan Analisis Standar Belanja, Pemprov Sultra Terus Lakukan Perbaikan Sejumlah Aspek



Pewartu: Amran

KENDARI, BP-Mewakili Pj. Gubernur, Komjen Pol. (P) Dr. (H.C) Andap Budhi Revianto, S.I.K., M.H, Sekda Sultra, Drs. H Asrun Lio., M.Hum., Ph.D mengungkapkan apresiasi dan terimakasih kepada kepala seluruh Pimpinan OPD, atas komitmen dalam mendukung akuntabilitas tata kelola pemerintahan lingkup Pemprov Sultra, terutama terkait implementasi dan tindak lanjut Analisis Standar Belanja (ASB).

Hal tersebut diungkapkan Sekda Sultra saat membuka secara resmi rapat koordinasi Analisis Standar Belanja (ASB) Provinsi Sultra Tahun 2025, Selasa (19/11/2024), di Kendari. Bahkan meskipun telah menerapkan Analisis Standar Belanja, Pemprov Sultra akan terus melakukan perbaikan sejumlah aspek.

“Namun yang menjadi penekanan bagi kita semua adalah kita mampu menjadi pembuat sejarah tentang tata kelola pemerintahan kita, khususnya dalam aspek perencanaan dan penganggaran, karena sudah mampu menerapkan ASB, walaupun dalam perjalanan penerapannya masih ada aspek-aspek yang harus terus dipenuhi dan disesuaikan kembali,” terangnya.

Dia melanjutkan, yaitu penyesuaian standar harga satuan pada aplikasi SIPD RI, penyesuaian terhadap regulasi TKDN, dan yang menjadi tanggung jawab selanjutnya adalah penyusunan ASB non fisik.

Berkaitan dengan upaya perbaikan itu juga, Sekda Sultra kembali memberikan apresiasi kepada selu-

ruh OPD lingkup Pemprov Sultra, karena telah menyempatkan hadir ditengah kesibukan aktivitas akhir tahun yang cukup padat, untuk berdiskusi bersama dalam kegiatan tersebut.

“Rapat koordinasi ASB ini sangat penting untuk kita semua, karena kita dituntut harus mampu menyelenggarakan setiap kegiatan, dengan biaya yang efisien. Hal ini sesuai dengan amanat UU Nomor 23 tahun 2014, tentang pemerintahan daerah,” katanya.

Selanjutnya, masih dia, PP Nomor 12 tahun 2019 tentang pengelolaan keuangan daerah, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 77 tahun 2020 tentang pedoman teknis pengelolaan keuangan daerah pada bagian belanja daerah di tetapkan bahwa “analisis standar belanja” standar harga satuan dan standar teknis digunakan untuk menyusun rencana kerja dan anggaran, dalam penyusunan rancangan perda tentang APBD.

“Yakinlah, aspek-aspek yang belum terpenuhi dan kendala lainnya, atas semangat teman-teman tim penyusun ASB, semua dapat berjalan dan terselesaikan, apabila dibutuhkan, kita akan bekerja sama dengan universitas yang berkompeten dalam penyusunan ASB,” ujarnya.

Sebelum mengakhiri sambutannya, Sekda Sultra berharap agar rapat tersebut bisa menghasilkan usulan perubahan dan penyesuaian dari OPD yang sangat dibutuhkan pada penyusunan dokumen ASB, sehingga output dan outcome dari rapat koordinasi menciptakan pemahaman yang sama dalam penjabaran ASB fisik dalam kertas kerja perencanaan dan penganggaran tahun 2025.

Turut hadir dalam kegiatan tersebut, diantaranya para Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama Lingkup Pemprov Sultra, peserta rapat koordinasi Analisis Standar Belanja, dan berbagai pihak terkait lainnya.*

Pj Bupati Buteng Kostantinus Bukide Hadiri peringatan hari Kesatuan Gerak (HKG) PKK ke-52



Laporan: Ardi

BUTENG, BP-Tim Penggerak PKK Kabupaten Buton Tengah menggelar peringatan hari Kesatuan Gerak (HKG) PKK ke-52, bertempat di gedung kesenian Lakudo, Rabu (30/7/2024).

Peringatan HKG PKK Kabupaten Buton Tengah dihadiri Pj Bupati Buton Tengah, Kostantinus Bukide, Pj Sekda, La Saripi, Forkopimda, para Kepala OPD, Pj Ketua TP PKK dan seluruh kader, sejumlah Camat dan tamu undangan.

Pj Bupati Buton Tengah, Kostantinus Bukide dalam sam-

butannya pertama menyampaikan selamat kepada seluruh jajaran TP PKK Kabupaten Buton Tengah bersama para pengurus dan anggota dimanapun berada, atas peringatan HKG PKK ke-52 tahun 2024.

Secara pribadi kata Pj Bupati, saya sangat setuju dengan tema yang diangkat dalam HKG Ke-52 tahun 2024," bergerak bersama PKK wujudkan keluarga sejahtera bersama Indonesia maju".

"Saya kira tema ini sangat tepat di mana hari ini perlu bergerak bersama. Tentu bergerak ber-

sama PKK kita harapkan ibu-ibu PKK bisa menjadi moto penggerak lokomotif dalam pelaksanaan program pembangunan baik di tingkat daerah, kecamatan, maupun tingkat desa/kelurahan",ujarnya.

Hari ini kita dihadapkan berbagai keadaan dan permasalahan, melalui momen HKG PKK kita harapkan betul-betul bisa mendorong atau meningkatkan motivasi kita untuk mengatasi berbagai permasalahan.

Dalam kegiatan ini saya berharap agar dalam program kerja PKK Buton Tengah betul-betul

bisa berkolaborasi, bergerak bersama dengan OPD.

"Peringatan HKG PKK ke-52 mari kita jadikan momentum untuk merubah pola-pola pikir kita yang selama ini sifatnya hanya formalitas, agar HKG PKK punya makna yang gemilang di masyarakat. Kesatuan gerak PKK yang kita peringati hari ini, kita jadikan momentum untuk bersinergi antara OPD dan TP PKK, kita bisa berakselerasi terhadap percepatan-percepatan pembangunan di daerah",pungkasnya. (*)

Sekda Buton Pimpin FGD Pemanfaatan SDI Kabupaten Buton



Pewartar: Rahim

BUTON, BP-Sekretaris Daerah Kabupaten Buton Asnawi Jamaluddin S.Pd.,M.Si memimpin Focus Group Discussion (FGD) implementasi pemanfaatan Satu Data Indonesia (SDI) Kabupaten Buton di Aula Kantor Bupati Buton, Pasarwajo, Rabu 17 Juli 2024.

Turut hadir Asisten Pemerintahan Kesra dan Setda Kabupaten Buton, Statistisi Ahli Madya BPS Provinsi Sulawesi Tenggara, Kepala BPS kabupaten Buton, Para Kepala OPD Lingkup Pemkab Buton dan Para Camat Sekabupaten Buton.

Pada kesempatan itu Sekretaris Daerah Kabupaten Buton, Asnawi Jamaluddin S.Pd.,M.Si menyampaikan bahwa diadakan FGD ini bertujuan untuk mencari informasi dan mendiskusikan permasalahan mengenai pendataan yang ada di Kabupaten Buton

"Karena di Kabupaten Buton ini, banyak hal-hal yang bisa kita selesaikan, kita tindaklanjuti namun terhambat karena persoalan data. Saya harap dengan adanya FGD ini kita dapat mencari solusinya sehingga segala penitrusan yang ada di Kabupaten Buton ini berjalan dengan lancar," ucapnya.

Jenderal ASN Buton ini mengharapkan kepada OPD untuk tidak hanya berdiam diri mengenai kendala persoalan data dan juga mengeluarkan saran atau informasi dalam menyelesaikan persoalan-persoalan data yang ada di Ka-

bupaten Buton juga inovasi yang ada dapat diimplementasikan dengan baik untuk membantu kebutuhan masyarakat Kabupaten Buton.

Kepala BPS Kabupaten Buton Zablin, SST., M.Si mengatakan Indonesia sejak bulan Maret 2024 telah mendaftarkan diri di organisasi ekonomi negara maju, salah satu menjadi tahapan menjadi anggota penuh dalam mengikuti akses dengan total komisi dipersiapkan sebanyak 26 komisi dan di antaranya yang termaksud dalam BPS itu yaitu komisi statistik dan pemanfaatan statistik.

Ia menyampaikan sebelum pertemuan ini, BPS Kabupaten Buton telah mengundang penanggungjawab data disetiap OPD. Dan saat itu sekitar 10 OPD yang diundang untuk melihat bagaimana proses pengumpulan data di masing-masing OPD.

Dari pertemuan tersebut kata Zablin ada dua kategori yakni data yang dihasilkan OPD dari hasil proses registrasi di OPDnya masing-masing dan juga pendataan yang dikumpulkan oleh OPD ke lapangan.

"Namun yang menjadi masalah yaitu di data yang harus OPDnya harus proaktif ke lapangan karena tidak ada kegiatan pendataan apapun ada pasti terbatas sehingga data yang ada hanya jumlah yang terdata saja,"katanya.

Dikatakannya, dengan adanya data ini seharusnya dapat membantu pemerintah daerah dalam

menyelesaikan masalah bukan menambah pekerjaan dan harusnya data diperoleh dari proses yang sudah berjalan sehingga data tinggal ditertibkan setiap adanya perubahan data.

Ia berharap kedepan dengan informasi yang kita hasilkan hari ini dapat menjadi langkah awal kita dalam menyelesaikan segala program yang ada sehingga dapat membantu kinerja pemerintah daerah Kabupaten Buton.

Pada kesempatan ini juga, statistisi Ahli Madya BPS Provinsi Sulawesi Tenggara, Moh. Amin S.E hadir menjelaskan Satu Data Indonesian ada yang bernama pembina data yakni BPS, wali data yakni Kominfo dan Koordinator Data yakni di Bappeda, dengan adanya 3 kategori tersebut menjadi cara satu data Indonesian ini dapat berjalan dengan baik.

Dikatakannya sebagai insan BPS yang menangani masalah data, dengan adanya forum seperti ini BPS sangat terbantu dalam hal meningkatkan literasi atau cakupan datayang kita miliki di wilayah Republik ini.

Ia berharap dengan ada pengembangan data di daerah ini bisa kita tanggulangi bersama karena dalam memulai suatu kegiatan harus memiliki suatu data sehingga ini merupakan langkah awal kita dalam pembangunan daerah khususnya daerah Kabupaten Buton.

FGD juga dilanjutkan dengan masukan dan kendala termasuk langkah konkrit yang dutarakan para kepala OPD Lingkup Pemkab Buton. (*)

Kostantinus Bukide Evaluasi Kinerja Kepala Desa di Aula Kantor Bupati Buton Tengah



Pewartar: Rahim

BUTENG, BP-Penjabat (Pj) Bupati Buton Tengah, Kostantinus Bukide, di dampingi Pj Sekda, La Saripi, Kepala BKPSDM, Wujududin, Kepala Inspektor-

at, La Ance Paulus, Kadis BPMD, Armin, melakukan evaluasi kinerja terhadap sejumlah Pj Kepala Desa, di aula kantor Bupati Buteng bumi prajalabungkari, Senin (29/7/2024).

Evaluasi ini bertujuan untuk meningkatkan kinerja pemerintah desa dalam pelayanan publik dan pembangunan daerah.

Evaluasi di lakukan dengan mengkaji berbagai aspek,

termasuk pengelolaan anggaran desa, pelaksanaan program-program pembangunan, serta pelayanan kepada masyarakat.

"Kita ingin memastikan bahwa setiap desa mampu memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat dan menjalankan program pembangunan dengan efektif dan efisien",ujar Pj Bupati.

Evaluasi ini akan dilakukan secara berkala untuk memastikan keberlanjutan peningkatan kinerja setiap desa di Buton Tengah. (*)

Lantik Anggota Kolegium Kesehatan Indonesia Pengganti Antarwaktu, Menkes Menitipkan Tiga Pesan



Laporan: Yeti

JAKARTA, BP-Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin melantik dan mengambil sumpah anggota Kolegium Kesehatan Indonesia Pengganti Antarwaktu masa bakti 2024-2028 di Ruang Kartini, lantai dua, Gedung dr. Adhyatma, Selasa (19/11/2024).

Dalam sambutannya, Menkes Budi menyampaikan tiga pesan penting mengenai pelayanan kesehatan kepada anggota kolegium yang baru dilantik. Pesan tersebut yakni, akses pelayanan yang mudah, kualitas pelayanan yang baik, dan harga yang terjangkau.

“Saya ingin titip pesan mudah-mudahan rakyat Indonesia bisa mendapatkan akses yang mudah, kualitas yang baik, harga yang terjangkau,

kau, atas pelayanan kesehatan. Tiga hal ini adalah misi yang saya ingin capai untuk seluruh rakyat Indonesia dimanapun dia berada. Tugas kolegium adalah menjadikan ketiga misi ini agar benar-benar bisa terealisasi ke seluruh pelosok Indonesia,” kata Menteri Budi.

Kolegium harus lebih agresif untuk menurunkan kompetensi ke seluruh pelosok Indonesia. Hal ini agar tugas kolegium sebagai pengampu dapat memberikan ilmu yang sebanyak-banyaknya untuk menjadikan pelayanan kesehatan merata ke seluruh pelosok Indonesia.

“Saya juga ingin memastikan bahwa kualitasnya terjaga. Kolegium harus memastikan bahwa dokter yang melakukan pelayanan yang sama kualitasnya dan

semua kota yang memiliki alat yang sama harus bisa melakukan tindakan yang sama,” ucapnya.

“Bagaimana kita mengejar kualitas pelayanan yang merata di seluruh Indonesia adalah tugas kolegium juga sebagai pengampu. Jadi, bukan hanya bisa tahu melakukan, tetapi bisa melakukan dengan konteks yang sama,” tambah Menkes.

Menkes Budi menutup sambutannya dengan memberikan ucapan selamat kepada anggota kolegium yang baru saja dilantik.

Pelantikan anggota Kolegium Kesehatan Indonesia Pengganti Antarwaktu ini didasarkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024, yang merupakan aturan pelaksanaan dari Undang-

Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan. Dalam peraturan tersebut, keanggotaan Kolegium Kesehatan Indonesia diangkat dan diberhentikan oleh Menteri Kesehatan.

Pelantikan anggota Kolegium Kesehatan Indonesia Pengganti Antarwaktu tersebut karena ada pengunduran diri dari anggota Kolegium Obstetri dan Ginekologi, sebagai anggota Kolegium Kesehatan Indonesia, periode 2024-2028.

Anggota Kolegium Kesehatan Indonesia yang dilantik sebagai anggota Kolegium Kesehatan Indonesia Pengganti Antarwaktu masa bakti 2024-2028 adalah Dr. dr. Ivan Rizal Sini, GDRM, MMIS, FRANZCOG, SpOG, yang berasal dari Kolegium Obstetri dan Ginekologi. (*)

Komitmen Widyapra Indonesia Wujudkan Pendidikan Bermutu untuk Semua

JAKARTA-Sebagai salah satu jabatan fungsional yang berinduk di Direktorat

Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah (Ditjen PAUD Dikdas-

men), Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen), Widyapra

dukung terciptanya sistem pendidikan yang mutu dan efisien. Untuk mewujudkan hal tersebut, Asosiasi

Widyapra Indonesia (AWI) menggelar Rapat Kerja Nasional (Rakernas) AWI 2024 di Jakarta pada tanggal 20 s.d 22 November 2024 dengan mengusung tema “Konsolidasi AWI dalam Mewujudkan Pendidikan Bermutu untuk Semua”.

“Kami menyambut baik agenda Rakernas ini dan mengapresiasi komitmen AWI untuk terus berkontribusi memajukan ekosistem pendidikan Indonesia. Sejatinya, dalam memajukan pendidikan ada tiga hal yang menjadi fokus utama, Pertama adalah memastikan adanya akses untuk layanan pendidikan, kedua adalah ketika layanan tersebut sudah ada selanjutnya adalah memastikan layanan pendidikan tersebut sudah berjalan dengan baik, dan ketiga yaitu memastikan layanan pendidikan itu harus berdampak positif dan menghasilkan kualitas dalam pembelajaran,” ujar Direktur Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah, Iwan Syahril saat membuka Rakernas AWI 2024, di Jakarta, Rabu (20/11).

Dalam kesempatan tersebut, Dirjen Iwan mengajak kepada seluruh peserta Rakernas AWI untuk menjawab tantangan dan target pembangunan pendidikan yang telah ditetapkan dalam UU nomor 59/2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional. Untuk menuju Indonesia Emas 2045, “Tujuan kita menuju 2045 adalah memastikan rata-rata angka lama sekolah setiap Warga Negara Indonesia (WNI) bersekolah minimal 12 tahun. Kemudian, angka harapan lama sekolah juga sampai di angka 14,81 tahun, dan kualitas hasil belajar yang dilihat dari skor PISA diharapkan sama atau setara dengan negara maju,”

paparnya, ia menyebutkan Indonesia harus memiliki sumber daya manusia (SDM) yang hebat

Selain itu, Dirjen Iwan juga menyoroti program Makan Bergizi Gratis. Menurutnya, investasi pada gizi anak Indonesia akan berdampak hasil belajar yang berkualitas dan pembangunan karakter peserta didik. Terkait program tersebut dan seluruh program prioritas Kemendikdasmen, Dirjen Iwan memandang AWI memiliki peran strategis untuk mewujudkan seluruh program tersebut.

“Melalui Rakernas AWI 2024 ini saya berharap lahirnya sebuah sistem kerja, ide, gagasan, atau inisiatif dari AWI untuk bagaimana ke depannya merumuskan dan mendukung sistem pendidikan Indonesia. Lebih lanjut, peran AWI juga harus memperkuat advokasi antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah. Semoga AWI terus berkembang dan menjadi bagian dari kemajuan pendidikan Indonesia,” pungkas Iwan.

Pada kesempatan yang sama, Direktur Sekolah Menengah Pertama, Imran, mengungkapkan bahwa latar belakang kegiatan Rakernas AWI 2024 ini adalah untuk merumuskan kebijakan dan strategi dalam mendukung program prioritas Kemendikdasmen dan Asta Cita Kabinet Merah Putih dalam bidang pendidikan. Terkait tema Rakernas, menurutnya diperlukan konsolidasi seluruh pengurus pusat dan ketua pengurus daerah AWI untuk mengadvokasi kebijakan mutu pendidikan, melaksanakan fasilitasi pemenuhan dan peningkatan mutu pendidikan kepada pemerintah, pemerintah daerah, satuan pendidikan, dan masyarakat penyelenggara pendidikan, melakukan pengembangan sistem penjaminan mutu pendidikan yang

berkelanjutan, serta meningkatkan kompetensi dan profesionalisme widyapra.

“Pada Rakernas AWI tahun ini setidaknya ada 100 lebih anggota yang akan hadir secara langsung. Kegiatan ini diharapkan akan meningkatkan wawasan terkait tentang jabatan fungsional widyapra, menghasilkan ide gagasan dalam rangka memberi masukan terkait program prioritas Kementerian, dan merumuskan target-target pekerjaan untuk tahun 2025,” ucap Imran.

Selanjutnya, selaku Ketua Umum AWI, Harris Iskandar, mengapresiasi kinerja AWI yang telah bekerja keras menyukseskan berbagai program dalam kurun waktu 2023 s.d. 2024. Dalam sambutannya, ia menjelaskan bahwa program-program yang akan disusun untuk tahun 2025 harus lebih realistis dan memberi dampak positif yang besar untuk Kemendikdasmen.

“Rakernas ini harus menghasilkan strategi komunikasi yang lebih solid. AWI harus menjadi motor penggerak pendidikan, baik di pusat maupun di daerah, menjadi jembatan komunikasi antara kebijakan pusat dan daerah, serta dapat diandalkan untuk menyelesaikan berbagai tantangan pendidikan ke depannya,” tutur Harris.

Rakernas AWI 2024 ini merupakan hasil kerja sama antara AWI dengan Direktorat Sekolah Menengah Pertama Kemendikdasmen. Dalam pelaksanaannya, rakernas ini juga akan menghadirkan narasumber dari pihak internal dan eksternal Kemendikdasmen. Hasil Rakernas ini akan digunakan sebagai acuan pelaksanaan kegiatan kepengurusan pusat dan akan menjadi acuan bagi pengurus daerah dalam menyusun rencana kerja kepengurusan daerah AWI Provinsi. (*)

Baubau Post
 Kritik, Lugas, Independen
 Wartawan Baubau Post tidak menerima imbalan dalam bentuk apa pun saat melakukan tugas jurnalistik. Dalam pelaksanaan tugas, wartawan Baubau Post dibekali tanda pengenal. Untuk itu masyarakat yang mencurigai seseorang yang mengatasnamakan Baubau Post, segera menghubungi Kantor Redaksi Surat Kabar Baubau Post
 Segala Berita yang diterbitkan oleh Baubau Post merupakan tanggungjawab penanggungjawab Redaksi

Pemimpin Umum : Fauzan NWA
 Penanggung Jawab/Pemimpin Redaksi : Ardi
 Redpel : Hengky TA
 Korlip : Hengky T.A
 Redaktur : Alyakin, Kasrun
 Reporter : Rahim, Mashuri, Jaya, Azis, Lisna

Layouter : Rlirin
 Pracetak : Aditya
 Cetak : Jamal

Penerbit : PT. Faren Grafika
 Komisaris : Erna Agule
 Direktur Utama : Andina Latief, SKM
 Manager Keuangan : Nabila D.A
 Manager Iklan dan Pemasaran : Fauzan
 Kepala Sirkulasi : Jamal
 Administrasi : Salvana
 Security :

Kepala Biro Wakatobi : Risman
 Kepala Biro Buton Utara : Fauzan
 Kepala Biro Buton : Rahman
 Kepala Biro Busel : Salvana
 Kepala Biro Buteng : Andini
 Kepala Biro Bombana :
 Kepala Biro Sultra :

Kontributor Baubau : Iphul, Kontributor Sultra : Amat Jr
 Kontributor Buton : Kontributor Butur : Kasrun,
 Kontributor Buteng : Hengki TA, Kontributor Busel : Amirul

Baubau : Jaya
 Agen Pasarwajo :
 Agen Butur : Samrihan

Harga Langganan : Dalam Kota Baubau Rp. 100.000,-/ bulan,
 Luar Kota Baubau + Ongkos Kirim,
 Eceran Dalam Kota Baubau : Rp.5.000,-

Alamat Redaksi/ Tata Usaha : Jl. Raya Palagimata, BTN Palagimata, Blok K-L No. 1
 Kelurahan Lipu, Kecamatan Betoambari Kota Baubau
 Tlp. 0402-2814207 - Email : baubaupost2019@gmail.com
 Percetakan : PT. Faren Grafika, Alamat: Jl. Raya Palagimata Blok K No 01, Kel. Lipu, Kecamatan Betoambari, Kota Baubau

Setahun Mangkrak, Firli Bahuri Akan Diperiksa Kasus SYL Pekan Depan



Eks Ketua KPK Firli Bahuri akan diperiksa pekan depan.

Pewarta: Alwan

JAKARTA- Polda Metro Jaya menjadwalkan pemeriksaan terhadap eks Ketua KPK, Firli Bahuri terkait dugaan pemerasan terhadap mantan Menteri Pertanian (Mentan) Syahrul Yasin Limpo (SYL) pada pekan depan.

Pemeriksaan terhadap Firli ini dilakukan untuk melengkapi berkas perkara sesuai dengan petunjuk yang diberikan jaksa.

"Untuk rencana tindak lanjut penyidikan dalam penanganan perkara aquo, telah diagendakan pemeriksaan tambahan terhadap tersangka FB pada minggu depan," kata Direktur Reskrim-

sus Polda Metro Jaya Kombes Ade Safri Simanjuntak kepada wartawan, Jumat (22/11).

Kendati demikian, Ade Safri belum membeberkan secara pasti kapan pemeriksaan akan dilakukan. Ia hanya menyebut surat panggilan telah dilayangkan oleh penyidik pada Rabu (20/11) lalu.

"Nanti kita update, yang jelas minggu depan. Surat panggilan terhadap tersangka FB sudah dikirimkan oleh penyidik," ujarnya.

Polda Metro Jaya menetapkan Firli sebagai tersangka kasus pemerasan terhadap eks Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo pada 22 November 2023.

Dalam kasus ini,

penyusunan jenderal bintang tiga Polri itu diduga melanggar Pasal 12 e dan atau Pasal 12 B dan atau Pasal 11 UU Tipikor juncto Pasal 65 KUHP dengan ancaman maksimal hukuman penjara seumur hidup.

Namun, setahun berstatus tersangka, tak ada perkembangan berarti dalam proses penyidikan yang dilakukan Subdit Tipidkor Ditreskrimsus Polda Metro Jaya.

Penyidik tercatat dua kali mengirimkan berkas perkara ke Kejaksaan Tinggi (Kejati) DKI Jakarta dan dua kali pula dikembalikan karena dinilai belum lengkap.

Pada Februari lalu, Firli tercatat sempat

kembali dipanggil untuk diperiksa guna melengkapi berkas perkara sesuai petunjuk jaksa. Namun, dua kali ia tak hadir.

Di sisi lain, Polda Metro Jaya dan Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta kini digugat ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan lantaran tak kunjung merampungkan kasus tersebut.

Gugatan dilayangkan ke Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan oleh Lembaga Pengawasan, Pengawalan, dan Penegakan Hukum Indonesia (LP3HI) serta Masyarakat Anti Korupsi (MAKI) dan terdaftar dengan nomor 116/Pid.Pra/2024/PN JKT.SEL. (*)

anggota Propam. Kabid Humas Polda Sumbar Kombes Dwi Sulistiawan menyebut alasan pihaknya tak memborgol Dadang adalah sebuah trik.

"Jadi terkait dengan foto yang beredar itu ya memang trik-trik atau cara-cara pemeriksaan, ini kan banyak caranya," kata Dwi saat dihubungi, Jumat (22/11).

Dwi menyebut saat itu Dadang dalam kondisi gangguan mental. Karenanya, kata Dwi, perlu dilakukan cara-cara khusus agar Dadang mau mengakui per-

Habiburokhman dan Sahroni Protes Keras: AKP Dadang Harusnya Diborgol



Komisi III DPR mengkritik standar penanganan Divisi Propam dalam menangani kasus penembakan yang dilakukan oleh AKP Dadang Iskandar.

Laporan: Hadi

JAKARTA-Komisi III DPR mengkritik standar penanganan Divisi Propam dalam menangani kasus penembakan Kasat Reskrim Polres Solok Selatan AKP Ulil Riyanto Anshari.

Ketua Komisi III Habiburokhman menyayangkan pelaku penembakan AKP Dadang Iskandar yang merupakan Kabag Ops Polres Solok Selatan tak diborgol selama pemeriksaan.

"Kami juga menyayangkan standar yang diterapkan propam setempat.

buatan yang dilakukannya.

"Kita saat ini menghadapi anggota yang sedang gangguan mental begitu, sehingga kalau kita nanti pakai dengan kekerasan tentu dia nanti enggak akan terbuka, jadi kita baik-baikin supaya dia terus terang bicaranya begitu," ucap dia.

Lebih lanjut, Dwi menegaskan pihaknya tak memberikan perlakuan khusus terhadap Dadang selama proses pemeriksaan.

"Enggak ada (perlakuan khusus). Jadi terkait foto-foto yang beredar itu ya itu pada saat pemeriksaan ya itu upaya-upaya supaya pelaku ini mengaku, benar-benar terbuka, jadi ya kita baik-baikin dulu begitulah kira-kira," tutur Dwi.

Kami lihat seorang tersangka pelaku penembakan itu tidak diborgol ketika dibawa maupun ketika ada di ruangan," kata Habib dalam konferensi pers, Kompleks Parlemen, Jakarta, Jumat (22/11).

Habib juga mengaku melihat suatu video yang justru menunjukkan Dadang berjalan didampingi selayaknya pejabat kepolisian.

Ia pun meminta Propam terkait untuk dievaluasi.

"Harusnya kan diborgol karena sudah melakukan tindakan yang sangat-sangat ekstrem," ucapnya.

Hal serupa juga

disampaikan Wakil Ketua Komisi III Ahmad Sahroni. Ia menyatakan sebagai terduga pelaku, seharusnya Dadang diborgol.

Dalam unggahan di Instagramnya @ahmadsahroni88,

ia membagikan sejumlah video yang menunjukkan Dadang tak diborgol.

"Ini Anggota Propam wajib

dievaluasi, terjadi dugaan pembunuhan tapi yang diduga pelaku

malah diperlakukan seperti tidak ada apa-apa, mustinya langsung diborgol," tulis Sahroni dalam Instagramnya. (*)

gaku melihat suatu video yang justru menunjukkan Dadang berjalan didampingi selayaknya pejabat kepolisian. Ia pun meminta Propam terkait untuk dievaluasi.

Hal serupa juga disampaikan Wakil Ketua Komisi III Ahmad Sahroni. Ia menyatakan sebagai terduga pelaku, seharusnya Dadang diborgol.

Dalam unggahan di Instagramnya @ahmadsahroni88,

ia membagikan sejumlah video yang menunjukkan Dadang tak diborgol. "Ini Anggota Propam wajib dievaluasi, terjadi dugaan pembunuhan tapi yang diduga pelaku malah diperlakukan seperti tidak ada apa-apa, mestinya langsung diborgol," tulis Sahroni dalam Instagramnya. (*)

AKP Dadang Tak Diborgol Karena Alasan Gangguan Mental



Polda Sumbar buka suara soal polisi penembak AKP Ulil di Solok Selatan tidak diborgol.

Laporan: Hamid

JAKARTA-Polda Sumatera Barat (Sumbar) buka suara atas kritikan Komisi

III DPR terhadap anggota Propam dalam menangani kasus penembakan Kasat Reskrim Polres Solok Selatan AKP

Ulil Riyanto Anshari. Kritik itu dilayangkan lantaran Kabag Ops AKP Dadang Iskandar tak diborgol saat diperiksa oleh

1



CALON BUPATI
SYARASWATI

CALON WAKIL BUPATI
Drs. H. RASYID
MANGURA, M.H.

PASANGAN CALON PERSEORANGAN

VISI

MEWUJUDKAN KABUPATEN BUTON YANG MANDIRI, MAJU, DAN BERDAYA SAING MELALUI OPTIMALISASI PEMANFAATAN SUMBER DAYA ALAM YANG BERKELANJUTAN UNTUK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT

MISI

1. MENINGKATKAN PENGELOLAAN SUMBER DAYA ALAM YANG BERKELANJUTAN DAN BERDAYA SAING.
2. MENDORONG PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR YANG MENDUKUNG PENGELOLAAN SUMBER DAYA ALAM.
3. MEMAJUKAN SEKTOR PERTANIAN, PERIKANAN, DAN KEHUTANAN DENGAN TEKNOLOGI MODERN
4. MENINGKATKAN KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA DAN KESEJAHTERAAN SOSIAL
5. MENGOPTIMALKAN PARAWISATA BERBASIS SUMBER DAYA ALAM DAN BUDAYA LOKAL
6. MEMPERKUAT TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG TRANSPARAN DAN PARTISIPATIF

2



CALON BUPATI
Drs. LA BAKRY, M.Si.

CALON WAKIL BUPATI
ARIS MARWAN SAPUTRA,
S.H.

GABUNGAN PARTAI POLITIK PENGUSUL



VISI

BUTON SEBAGAI KAWASAN BISNIS DAN BUDAYA TERDEPAN MENUJU INDONESIA EMAS 2045

MISI

1. PENGEMBANGAN SUMBER DAYA ALAM (SDA) SAINS, TEKNOLOGI DAN TATA RUANG KAWASAN.
2. TRANSFORMASI PENDIDIKAN, KESEHATAN DAN PEMBANGUNAN SUMBER DAYA MANUSIA (SDM).
3. KESETARAAN GENDER, PEMULA (GENERASI MILENIAL DAN GENERASI Z) DAN PENYANDANG DISABILITAS.
4. PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR, UMKM DAN INDUSTRI KREATIF
5. REFORMASI BIROKRASI, KESADARAN HUKUM DAN TRANSPORTASI KEBUAKAN PEMERINTAH DAERAH.
6. PERKUAT PENYELARASAN HUBUNGAN SOSIAL KEMASYARAKATAN DAN PELESTARIAN BUDAYA.

3



CALON BUPATI
H. LA ODE NAANE

CALON WAKIL BUPATI
H. AKALIM, S.Pd.

GABUNGAN PARTAI POLITIK PENGUSUL



VISI

TERWUJUDNYA BUTON SEBAGAI RUMAH BERSAMA YANG CERDAS, SEJAHTERA, BERDAYA SAING, MENGHARGAI PERBEDAAN DAN MEMILIKI JIWA GITONG ROYONG

MISI

1. MENCIPTAKAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG GOOD GOVERNANCE DAN CLEAN GOVERNANCE, DENGAN DUKUNGAN TEKNOLOGI SERTA PELAYANAN PUBLIK YANG BERKUALITAS DAN BERDAYA SAING BAGI MASYARAKAT BUTON SMART.
2. MENINGKATKAN SUMBER DAYA MANUSIA MELALUI PELAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN YANG BERKUALITAS DAN TERJANGKAU MENUJU GENERASI BUTON EMAS.
3. MEMBANGUN EKONOMI YANG KREATIF DAN INOVATIF UNTUK MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN.
4. MEMBANGUN SARANA DAN PRASARANA YANG MEMADAI UNTUK MENDUKUNG TERWUJUDNYA KABUPATEN BUTON YANG CERDAS (BUTON SMART CITY).
5. MENGUATKAN BUDAYA MASYARAKAT YANG SALING MENGHARGAI DAN JIWA GOTONG ROYONG.

4



CALON BUPATI
Drs. BASIRAN, M.Si.

CALON WAKIL BUPATI
LA ODE RAFIUN, S.Pd.,
M.Si.

PARTAI POLITIK PENGUSUL



VISI

BUTON MAJU, TERCIPTANYA MASYARAKAT BUTON YANG ADIL DAN MAKMUR DI TAMBAI DENGAN MENINGKATNYA DERAJAT PENDIDIKAN DAN KESEHATAN SERTA KONDISI EKONOMI MASYARAKAT LEBIH BAIK. BUTON BERDAYA SAING, MASYARAKAT BUTON YANG MERELIKI KELINGGULAN KOMPETITIF UNTUK MENGHADAPI PERSAINGAN DI MASA YANG AKAN DATANG MENUJU INDONESIA EMAS 2024-2029

MISI

1. MENCIPTAKAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BAIK DENGAN DUKUNGAN TEKNOLOGI UNTUK MENINGKATKAN KUALITAS PELAYANAN KEPADA MASYARAKAT
2. MENINGKATKAN KUALITAS SUMBERDAYA MANUSIA MELALUI PELAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN YANG BERKUALITAS DAN MUDA SERTA TERJANGKAU
3. MEMBANGUN EKONOMI YANG KREATIF DAN INOVATIF DENGAN PERTIMBANGAN DAYA SERAP TENAGA KERJA PRODUKTIF DALAM MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN.
4. MENINGKATKAN KETAHANAN MASYARAKAT DALAM MENGHADAPI BERBAGAI MACAM ANCAMAN DAN GANGGUAN BERLANDASKAN MELAI NILAI FALSAFAH DAN BUDAYA KEBUTONAN DENGAN MENUNJUNG TINGGI NORWA KEAGAMAAN
5. MEMBANGUN SARANA DAN PRASARANA DASAR YANG PRIORITAS UNTUK MENDUKUNG TERWUJUDNYA DAERAH MAJU BAIK KUANTITAS MAUPUN KUALITAS
6. MENIMPLEMENTASIKAN ADAT ISTADAT DAN KEBUDAYAAN DAERAH DALAM MENAKIKAN KARASITAS DAERAH.

5



CALON BUPATI
Dr. BERE ALI, M.Si.

CALON WAKIL BUPATI
LAODE MUHAMAD
SUMARLIN BUCHARI, S.E.

GABUNGAN PARTAI POLITIK PENGUSUL



VISI

BERLIAN MEWUJUDKAN BUTON YANG LEBIH BAIK

MISI

1. PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA SEBAGAI MODAL UTAMA PEMBANGUNAN.
2. PENUMBUHAN INVESTASI SEBAGAI SARANA PENCIPTAAN LAPANGAN KERJA.
3. PENGEMBANGAN USAHA MIKRO, KECIL, DAN MENENGAH UNTUK MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT.
4. PENINGKATAN INFRASTRUKTUR SECARA MERATA.
5. PELAYANAN PUBLIK YANG SEMAKIN EFEKTIF DAN EFISIEN.

6



CALON BUPATI
ALVIN AKAWIJAYA
PUTRA, S.H.

CALON WAKIL BUPATI
SYARIFUDIN SAAFA, S.T.

GABUNGAN PARTAI POLITIK PENGUSUL



VISI

TERWUJUDNYA MASYARAKAT YANG RELIGIUS, SEJAHTERA, MANDIRI DAN BERDAYA SAING MELALUI PEMBANGUNAN YANG BERKELANJUTAN (BUTON BERSINAR MAS)

MISI

1. MENINGKATKAN KUALITAS PELAYANAN DAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BAIK (GOOD GOVERNANCE), SERTA MENDORONG TERCIPTANYA KEHIDUPAN BERMASYARAKAT YANG RELIGIUS, KONDISIF DAN BERBUDAYA.
2. MENINGKATKAN KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA, PENGELOLAAN SUMBER DAYA ALAM YANG BERKELANJUTAN DAN MENJAGA LINGKUNGAN HIDUP YANG BERKUALITAS.
3. MENINGKATKAN KEMANDIRIAN EKONOMI DAERAH YANG BERBASIS POTENSI LOKAL, MEMBUKA LAPANGAN KERJA DAN KESEMPATAN BERUSAHA SERTA MENGURANGI KEMISKINAN.